MACHIAVELLI DAN DEMOKRASI: PERSPEKTIF KEKUASAAN DAN KEPEMIMPINAN DALAM NEGARA REPUBLIK

Siti Pujiastuti Suhartini; Pitri Anggraeni; Anggia Rahmadani; Mohammad Alvi Pratama; Universitas Pasundan, Sitipujiastuti42@gmail.com

*ABSTRACT: Niccolò Machiavelli was a prominent 16th-century philosopher known for his views on political science and political philosophy. His most popular and still relevant ideas today concern power and leadership, as presented in his works *The Prince* and *Discourses on Livy*. This study employs a qualitative research method with a library research approach and uses descriptive-analytical analysis. In addition, the study utilizes several approaches, including conceptual analysis and historical approaches, relying on three main sources: primary, secondary, and tertiary materials. Machiavelli had a realistic and empirical view of power and leadership. He classified forms of government into monarchies—ruled by kings and nobles who often employed cruelty or intimidation to ensure the people's obedience through political intelligence, military strength, and the courage to make firm decisions, even if it meant using utterly immoral tactics. He also differentiated between hereditary states and mixed states. Regarding democracy, he focused on the role of the individual as an independent actor who owns, creates, and utilizes political resources. Machiavelli distinguished between the actual and the ideal, revealing the inevitable tension between personal morality and political morality. He also introduced the concepts of *virtù* and *fortuna*.*

Keywords: Machiavelli, Power, Leadership, Democracy Interpretation, Religion and power, September 30th Movement, Action 212.

ABSTRAK: Niccolò Machiavelli merupakan salah satu filsuf pada abad ke-16 yang terkenal dengan pandangan-pandangannya yang berkaitan dengan ilmu politik atau filsafat politik. Pandangan Machiavelli yang paling populer dan masih relevan hingga saat ini yaitu mengenai kekuasaan dan kepemimpinan dalam karya-karyanya yaitu *The Prince* dan *Discourses on Livy*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif analisis. Selain

itu, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan konseptual analisis dan pendekatan historis dengan menggunakan tiga bahan utama yaitu primer, sekunder dan tersier. Machiavelli memiliki pandangan yang realistis dan empiris mengenai kekuasaan dan kepemimpinan. Dia mengklasifikasikan bentuk-bentuk pemerintahan menjadi monarki yang diperintah oleh raja dan bangsawan yang menggunakan kekejaman atau intimidasi untuk memastikan kepatuhan rakyat melalui kemampuan dalam kecerdasan politik, kekuatan militer, dan keberanian untuk mengambil keputusan yang tegas, meskipun itu berarti menggunakan taktik yang sama sekali tidak bermoral. Selain itu, ia juga membedakan antara negara turunan dan negara campuran. Mengenai demokrasi, ia berfokus pada peran individu sebagai aktor independen yang memiliki, menciptakan, dan memanfaatkan sumber daya politik. Machiavelli memisahkan yang aktual dari yang ideal, mengungkapkan ketegangan yang tak terelakkan antara moralitas pribadi dan moralitas politik, dan menawarkan konsep *virtu* dan *fortuna*.

Kata Kunci : Machiavelli, Kekuasaan, Kepemimpinan, Demokrasi.

I. PENDAHULUAN

Niccolo Machiavelli adalah seorang filsuf, penulis dan diplomat asal Italia pada zaman abad ke-16. Machiavelli lahir pada tanggal 3 Mei 1469 di Florence, Italia dan merupakan putra dari seorang ahli hukum (pengacara) dan bangsawan Toskana. Nama Machiavelli dikenal di dalam ilmu politik dan filsafat politik, yang sering dihubungkan dengan praktik-praktik busuk kekuasaan seperti taktik “Machiavellian” seorang diktator (Hardiman, 2019). Nama Machiavelli sampai saat ini dikenal sebagai seorang teladan untuk kelicikan, muka dua dan juga itikad buruk dalam perkara politik sehingga ia dipanggil sebagai “Machiavelli yang kejam” yaitu julukan Shakespeare untuknya, yang menjadi objek kebencian bagi para moralis dengan pendekatan serta sikap konservatif dan revolusioner serupa (Tia Setiadi, 2022).

Machiavelli sebagai seorang yang terlibat dengan politik memiliki hubungan dengan Cesare Borgia (1457-1507) yaitu seorang

bangsawan tinggi kota Valentino yang memiliki sifat sangat ambisius dan gila dengan kekuasaan, ketika ia ingin menaklukkan Italia yang sedang dikuasai oleh Paus Julius II, Machiavelli menjadi seorang pengamat pribadi yang paling jeli. Namun karirnya menjadi hancur saat keluarga Medici yang memusuhinya telah menguasai Florence sehingga Machiavelli pun dijebloskan kedalam penjara selama setahun lamanya (Hardiman, 2019).

Setelah Machiavelli terbebas dari kurungan penjara, ia langsung menuliskan hasil-hasil pengamatan dan pengalamannya, sehingga menghasilkan dua karya yang sangat populer yaitu karya *The Prince* (yang dalam bahasa Inggris berjudul *The Prince* atau Sang Pangeran dalam bahasa Indonesia) dan karya *Discorsi sopra la prima decade di Tito Livio* (Diskursus tentang sepuluh buku pertama dari Titus Livius) yang terbit pada tahun 1531 (Hardiman, 2019). Sebenarnya masih ada karya Machiavelli lainnya seperti beberapa novel dan komedi yang sering diabaikan.

Pada tahun 1498 saat rezim Savonarola jatuh (dihukum mati), Machiavelli yang saat itu usianya baru 29 tahun dan belum pernah memiliki pengalaman politik sebelumnya ditunjuk untuk melayani di bawah Adriani sebagai Kepala Kanselir Kedua (pada saat ini lah Machiavelli pertama kali memegang peranan yang penting dalam pemerintahan kota Florence) (Honeycutt, t.t.).

Ketika Machiavelli bergabung ke dalam kantor pemerintahan, terdapat metode perekrutan tetap pada kantor-kantor utamanya. Selain memiliki kemampuan diplomatik, para calon pegawai juga diharuskan memiliki kompetensi mengenai ilmu humanisme. Disaat kota Florence semakin menganut kepercayaan tersebut, mereka mulai memanggil para humanis terkemuka mereka untuk mengisi posisi bergengsi dalam pemerintahan kota. Pada saat Machiavelli beranjak dewasa, jabatan kanselir pertama dipegang oleh Bartolomeo Scala yang tetap mengajar di Universitas dan tetap menulis dengan tema humanis seperti karya utamanya yang berjudul "*History of Florentines*". Bahkan selama Machiavelli bekerja di kantor pemerintahan, tradisi-tradisi tersebut tetap dipertahankan oleh para

penerus Scala. Sehingga dengan adanya kelaziman konsep tersebut menjadi sebuah alasan Machiavelli dapat ditunjuk disaat usianya masih tergolong muda untuk dapat menempati jabatan dengan tanggung jawab administratif yang besar dalam pemerintahan (Tia Setiadi, 2022).

Keluarga Machiavelli memiliki kedekatan dengan para humanis kalangan atas di Florence, ayahnya yang bernama Bernardo memiliki semangat dalam mempelajari humanisme, sehingga ia akrab dengan beberapa cendekiawan termasuk Bartolomeo Scala yang menulis risalah “Dialogue on Laws and Legal Judgements” pada tahun 1483. Bernardo sangatlah menyukai buku sehingga ia pun menyusun sebuah perpustakaan kecil yang terdapat buku-buku karya filsuf Yunani dan Romawi terutama Aristoteles dan Cicero, para ahli retorika dan buku-buku sejarah Italia (Violi, t.t.).

Saat Machiavelli beranjak dewasa, ayahnya sedang sibuk mengkaji beberapa teks klasik terkemuka yang didalamnya terdapat konsep humanisme pada masa Renaisans, yang tercatat bahwa ia pernah meminjam Philippics milik Cicero pada tahun 1477 serta karya retorika, De Oratore pada tahun 1480 dan juga meminjam risalah moral paling penting milik Cicero, De Officiis beberapa kali pada tahun 1470-an bahkan pada tahun 1476 ia berhasil mendapatkan salinan “History of Rome karya Livy” yang menjadi kerangka karya Machiavelli yang berjudul Discourses yang paling panjang dan ambisius dalam bidang filsafat politik. Selain itu, dalam buku harian Bernardo telah merincikan biaya besar yang dikeluarkan agar ia dapat memastikan Machiavelli dapat mempunyai pendidikan dasar ilmu humanitas yang unggul. Machiavelli memulai pendidikan setelah berumur tujuh tahun yaitu ketika ayahnya sedang mencatat “Putra kecilku, Niccolo mulai menemui Master Matteo” sebagai tahap awal pendidikan formalnya yaitu mempelajari bahasa Latin. Pada usia 12 tahun, Machiavelli lulus tahap kedua kemudian menerima bimbingan dari seorang guru kenamaan, Paolo da Ronciglione, yaitu guru dari beberapa humanis terkemuka dalam generasi Machiavelli (Tia Setiadi, 2022).

Kemudian pada tanggal 5 November 1481 berdasarkan buku harian Bernardo, Machiavelli telah mampu menulis karangan Latik miliknya sendiri dengan mengikuti metode humanis standar dalam meniru gaya klasik terbaik. Sehingga pada akhirnya perkataan Paolo Giovio dapat dipercaya dan terdapat kemungkinan Machiavelli dapat diutus untuk menyelesaikan pendidikannya di University of Florence. Giovio menyatakan di Maxims bahwa Machiavelli memiliki masa terbaik dalam pelatihan klasiknya dari Marcello Adriani, yaitu yang memegang jabatan di Universitas selama beberapa tahun sebelum pengangkatannya sebagai kanselir pertama.

Dengan adanya latar belakang humanis tersebutlah yang menjadi kemungkinan mengapa Machiavelli dapat menerima surat resmi penunjukannya pada tahun 1498. Adriani yang pada saat itu telah menjabat sebagai kanselir pertama di tahun yang sama menjadi adanya dugaan bahwa ia mengingat Machiavelli dalam humanisme dan memutuskan untuk memberikan jabatan kosong di kantor pemerintahan akibat adanya pergantian rezim. Sehingga karena adanya dukungan dari Adriani dan adanya pengaruh dari teman-teman humanis Bernardo, Machiavelli mampu memulai karir publiknya dalam pemerintahan baru anti Savonarola (Tia Setiadi, 2022).

Namun bagaimana pandangan Machiavelli mengenai kekuasaan dan kepemimpinan dalam negara republik sehingga karyanya sampai saat ini sangatlah populer yang sering dihubungkan dengan praktik-praktik busuk kekuasaan seperti taktik “Machiavellian” karena pemikirannya yang realistik?

Berkaitan dengan uraian tersebut diatas maka penelitian ini ingin mengkaji mengenai Machiavelli dan Demokrasi: Perspektif Kekuasaan dan Kepemimpinan dalam Negara Republik.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui interpretasi mendalam terhadap bahan-bahan yang digunakan tanpa menggunakan perhitungan yang berupa angka-angka, artinya hasil

penelitian akan peneliti deskripsikan secara menyeluruh, kemudian diambil kesimpulan (Maskanah dkk., 2024). Dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep pemikiran Machiavelli mengenai kekuasaan, kepemimpinan dan demokrasi serta bagaimana pengaruh pemikiran Machiavelli terhadap perkembangan hukum dan politik modern melalui kajian pustaka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual analisis dengan mempelajari dan membangun penelitian berdasarkan teori yang sudah ada untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsep-konsep pemikiran Machiavelli. Dalam penelitian ini juga diperlukan pendekatan historis yaitu meninjau dari sudut tinjauan sejarah yang berhubungan perspektif dan pengaruh pemikiran Machiavelli terhadap hukum dan politik modern, baik dalam segi teori maupun prakteknya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari tiga jenis bahan utama yaitu bahan primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku filsafat hukum yang membahas pemikiran Machiavelli, karya asli Machiavelli seperti *The Prince* dan *Discourses on Livy*, jurnal akademik, ensiklopedia, bibliografi dan karya ilmiah yang mendukung analisis konseptual dan historis..

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kekuasaan dan Kepemimpinan Menurut Machiavelli

Niccollo Machiavelli dalam karya bukunya yaitu "*Il Prince*" memberikan pandangan secara realistis dan empiris tentang kekuasaan dan kepemimpinan. Dalam bukunya "*Il Prince*", Machiavelli berpendapat bahwa semua negara dan wilayah kekuasaan tempat umat manusia bernaung berbentuk suatu negara republik atau suatu kerajaan. Kerajaan tersebut dapat berupa kerajaan karena turun temurun atau dapat berupa suatu kerajaan baru (Machiavelli, 1987).

Dalam “II Prince” Machiavelli menyatakan bahwa bentuk pemerintahan dapat diklasifikasikan menjadi dua model pemerintahan, yaitu Kerajaan yang diatur oleh seorang raja yang ditaati oleh semua penduduk dan para menteri, dengan direstui dan atas persetujuannya, membantu memerintah atau diatur oleh seorang raja dan para bangsawan yang tinggi rendah kedudukan mereka tidak ditentukan oleh persetujuan raja tetapi oleh garis keturunan mereka yang sudah lama ada (Machiavelli, 1987).

Selain kerajaan, Machiavelli juga menjabarkan beberapa bentuk negara dalam karyanya “II Prince”, diantaranya yaitu negara turunan dan negara campuran. Negara turunan merupakan negara yang pemimpinnya berganti menurut garis keturunan dari raja yang bertahta. Sedangkan negara campuran adalah negara yang didirikan melalui kolonialisme atau pendudukan. Dari beberapa jenis negara ini, negara turunan adalah negara yang paling mudah dikelola karena kondisi sosial dan politiknya sudah mapan bahkan sebelum raja berkuasa. Sedangkan negara campuran, karena kondisi politik dan sosialnya yang sangat rapuh, Machiavelli memberi banyak sekali batasan dan arahan-arahan yang ketat demi bertahannya negara tersebut (Fahrezy & Hamid, 2021).

Pada dasarnya pemikiran Machiavelli dalam bukunya yang berjudul “II Prince” mengandung gagasan kekuasaan meskipun didalam buku tersebut tidak disebutkan dengan lugas dalam menyatakan pentingnya konsep kekuasaan diretropeksi, menurut Machiavelli berpikir terlalu teoritis memiliki kesan yang biasa saja, selain itu seorang raja diharuskan untuk mewujudkan dalam melindungi rakyat dan segala keputusan berada ditangan raja (penguasa) secara penuh oleh karena itu, kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengontrol kekuasaan sangatlah terbatas. (Puspitasari, 2001).

Selain itu pemikiran Machiavelli dalam karya “II Prince” pada dasarnya memikirkan apa sebenarnya hakikat dan tujuan dari sebuah negara, pada hakikatnya negara merupakan suatu organisasi masyarakat, dimana sekelompok orang yang dengan kerjasama dan

pembagian tugas yang jelas mengejar suatu tujuan bersama yang tidak dapat dicapai orang masing-masing, karena di luar kemampuannya sendiri kerjasama demi tercapainya tujuan bersama (Puspitasari, 2001).

Menurut Machiavelli sendiri kekuasaan memiliki sifat absolut atau mutlak atau berkuasa sepenuhnya untuk mengontrol masyarakat meskipun menggunakan intimidasi bahkan kekerasan meskipun dapat dikatakan tidak bermoral tetapi hal tersebut tetap diperlukan agar patuh terhadap penguasa, hal tersebut sesuai dengan jenis kepemimpinan kerajaan (monarki) dimana kekuasaan dari raja merupakan sumber keabsahan kebijakan-kebijakan yang ada pada kerajaan atau negara tersebut, tetapi menurut Machiavelli bahwa dalam kekuasaan institusional atau kekuasaan yang diperoleh dari jasa baik terhadap rakyat memberikan dampak positif yang membuat rakyat memberikan dukungan penuh terhadap orang tersebut meskipun bukan berasal dari keluarga bangsawan atau kerajaan, karena rakyat percaya akan kemampuan untuk menjadi penguasa (Qomariyah, 2024).

Dalam konteks kedaulatan, negara juga memiliki hak dalam menciptakan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan harus dipatuhi oleh masyarakat, hal ini mencerminkan pemikiran Machiavelli bahwa hukum yang kuat merupakan tonggak utama dalam menjaga ketertiban dan kestabilan negara (Puspitasari, 2001).

Kedaulatan yang merupakan ciri utama negara itu bersumber pada tujuan negara sebagai masyarakat yang paling lengkap dan dapat dikatakan paling tinggi, mengapa kedaulatan dapat dikatakan sangat penting, karena tanpa kedaulatan negara tidak akan dapat untuk mencapai tujuannya, selain itu kedaulatan sendiri memiliki tujuan yang lebih luas dan lebih lengkap daripada tujuan masyarakat yang lain (Puspitasari, 2001).

Menurut Machiavelli reformasi pemerintah merupakan salah satu hal yang paling berbahaya dan sangat sulit untuk direalisasikan, karena setiap orang secara alami resisten terhadap perubahan dari reformasi, mereka yang diuntungkan dari tatanan lama akan menolak perubahan dengan sangat keras dan melakukannya dengan segala cara untuk mempertahankannya, sedangkan berlaku sebaliknya dengan mereka

yang merasa akan diuntungkan dengan tatanan baru akan mendukung sang penguasa, meskipun tidak mungkin untuk sang penguasa memenuhi harapan dari semua orang (Putra, 2014).

Machiavelli sendiri menekankan diperlukannya realisme sebagai lawan untuk idealisme, dalam buku “II Prince” meskipun dia tidak dijelaskan secara langsung mengenai tujuan etis atau politik, tetapi kedua hal tersebut diperlukan, realisme sendiri merupakan keadaan atau opini yang berpacu pada keadaan sesuai dengan realita atau fakta, dan realisme sendiri diperlukan untuk melawan idealisme yang merupakan sebuah pemikiran yang tertanam tanpa memperdulikan lingkungan sekitar (Putra, 2014).

Menurut Machiavelli politik dan kekuasaan merupakan sebuah abstraksi pengetahuan yang dibatasi oleh “yang etis dan yang estetis”, berdasarkan pemikiran dari Machiavelli menunjukkan bahwa ia telah keluar dari batasan “yang etis” pada masa itu dan lebih menumbuhkan “yang estetis”.

Maksud dari pemikiran Machiavelli mengenai pentingnya mempertimbangkan kepentingan negara diatas segalanya berartikan, dalam situasi apapun apabila terdapat pilihan di antara kepentingan negara dan kepentingan lainnya misalkan partai politik, kepentingan negara harus diutamakan.

Selain itu, menurut Machiavelli seorang pemimpin diharuskan memiliki sifat yang bijaksana dan memiliki kecerdikan dalam menjalankan pemerintahannya, arti dari cerdas disini yaitu seorang pemimpin harus bisa mengatasi segala situasi tanpa memperlihatkan situasi sebenarnya pada rakyatnya, dan memberikan keputusan-keputusan yang bijaksana dalam menyelesaikan situasi tersebut.

Sejalan dengan pandangan diatas, Machiavelli juga menekankan, bahwa Raja (penguasa) dapat membuat suatu kebijakan tidak harus melibatkan masyarakat sepenuhnya agar dapat membuat ketertiban sepenuhnya, karena yang paling penting adalah masyarakat harus takut pada penguasa agar dapat mengikuti kebijakan (Puspitasari, 2001).

Berdasarkan pemikiran Machiavelli dalam karya “II Prince”, hanya membicarakan tentang substansi kekuasaan tanpa menggagas kembali tentang konsep kekuasaan negara, Machiavelli mendobrak pemikiran tradisional tentang kekuasaan yang berlaku hanya pada masanya serta menurutnya menggabungkan kekuasaan dengan religi hanya akan memberikan jalan menuju kehancuran saja (Irpan dkk., 2024).

Dalam karya “II Prince” seorang pemimpin memiliki tuntutan yang diharuskan untuk bijaksana dan tegas dalam menjalankan dan mempertahankan kepemimpinan, Machiavelli berpendapat bahwa seorang pemimpin yang ideal diharuskan memiliki kecerdasan politik, kekuatan militer yang kuat keberanian dan mampu menjatuhkan keputusan yang tegas. Pemimpin harus mampu memahami realitas politik dan beradaptasi dengan situasi yang selalu berubah-ubah. Selain itu, Machiavelli juga menekankan pentingnya kekuasaan dan menjaga otoritas dari penguasa tersebut, baginya tujuan utama dari seorang pemimpin adalah mempertahankan kekuasaannya dan kestabilan dari suatu negara, meskipun jika diharuskan menggunakan taktik yang licik atau kejam (Model Negara Kekuasaan: Orde Baru dalam Tinjauan Pemikiran Hobbes dan Niccolo Machiavelli | Oktaviani | Perspektif Indonesia, t.t.).

Machiavelli menegaskan, bahwa dalam membuat negara yang baik memerlukan tindakan-tindakan untuk melindungi negara, bahkan jika tindakan tersebut dianggap kejam. Seorang pemimpin harus berani dalam mengambil tindakan tegas walaupun harus melakukan tindakan yang tidak bermoral sama sekalipun demi mempertahankan kekuasaan dan kestabilan negara (Putra, 2014).

Pemikiran Machiavelli sering dianggap bertentangan karena menekankan pada kekuasaan dan melakukan manipulasi dalam kepemimpinan, serta melakukan segala cara tetapi menurut Machiavelli hal tersebut diperlukan bagi seorang pemimpin sebagai salah satu strategi menghadapi politik yang kejam (Model Negara Kekuasaan: Orde Baru dalam Tinjauan Pemikiran Hobbes dan Niccolo Machiavelli | Oktaviani | Perspektif Indonesia, t.t.).

Selain kecerdasan politik dan ketegasan dalam kepemimpinan, Machiavelli juga menekankan bahwa ada dua unsur yang dapat menentukan keberhasilan seorang pemimpin, yaitu virtue dan fortune. Virtue adalah kemampuan dasar kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemampuan dasar ini meliputi bagaimana cara seorang pemimpin merawat kestabilan politik di suatu dominan negara. Seorang pemimpin harus bisa memilih tindakan yang benar dan tepat untuk setiap masalah di negaranya. Fortune, unsur yang dapat diartikan sebagai “keberuntungan” seorang pemimpin. Sebuah kebijakan bisa saja gagal jika seorang pemimpin tidak memiliki keberuntungan (Fahrezy & Hamid, 2021).

Machiavelli berpendapat bahwa hubungan antara penguasa dan rakyat harus didasarkan pada keseimbangan antara kepentingan rakyat dan ketegasan penguasa dalam mengambil keputusan yang sulit. Untuk mendapatkan dukungan dari rakyat, pemimpin harus mempertimbangkan kepentingan rakyatnya sendiri. Seorang pemimpin juga harus berani mengambil keputusan yang tegas meskipun sulit, bahkan jika keputusan tersebut tidak selalu diterima dengan baik oleh orang lain. Karena tidak mungkin bagi sang penguasa untuk dapat memenuhi keinginan semua orang pasti selalu ada yang merasa tidak puas, maka dari itu seorang pemimpin juga harus memiliki sifat yang memaksa (Putra, 2014).

Menurut Machiavelli, dalam mempertahankan kekuasaannya diperlukan segala strategi dan taktik. menurutnya, salah satu strategi yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin adalah memperkuat kekuatannya untuk mempertahankan kekuasaannya. Kekuasaan tersebut harus diwujudkan dengan adanya angkatan perang yang kuat dan tangguh serta berasal dari rakyatnya sendiri. Penguasa yang bergantung pada pasukan sendiri dan dapat menggunakan kekuatannya dengan bijak dan baik akan lebih mudah dalam mempertahankan kekuasaannya dibandingkan dengan mereka yang hanya bertumpu mengandalkan keberuntungan atau bantuan kepada pihak lain. Seorang pemimpin yang mendasarkan kekuasaannya pada dukungan rakyat akan cenderung lebih stabil dibanding yang bergantung pada kaum

bangsawan, yang seringkali memiliki kepentingan pribadi dan dapat berbalik menentang penguasa. Dalam konteks militer, tentara bayaran merupakan sebuah ancaman bagi stabilitas kekuasaan karena loyalitas mereka tidak bergantung pada kesetiaan negara ataupun pemimpinnya. Ketika keadaan menjadi sulit mereka cenderung berpihak kepada pihak lain yang menawarkan bayaran yang lebih tinggi akan dengan mudah mengkhianati pemimpin mereka (Machiavelli, 1987).

2. Demokrasi Menurut Machiavelli

Mengenai demokrasi, Machiavelli memiliki pendekatan yang berfokus kepada peranan individu sebagai aktor mandiri yang memiliki, menciptakan dan memanfaatkan sumber daya politik (Liddle, 2011).

Dalam karya *The Prince*, terdapat beberapa perspektif Machiavelli yang masih sesuai dengan kondisi saat ini. Seperti pandangan Machiavelli memisahkan yang aktual dari yang ideal, yang nyata dari yang diharapkan dan *das Sein* dari *das Sollen*. Kemudian Machiavelli menyatakan mengenai adanya tensi antara moralitas pribadi dan moralitas politik yang tidak bisa dihindari. Moralitas bagi kaum politisi termasuk di negara demokratis modern berbeda dengan moralitas pribadi seseorang (Liddle, 2011). Melakukan pendustaan, berbohong atau melebih-lebihkan sesuatu merupakan hal yang biasa terjadi dimana-mana karena merupakan suatu taktik politik. Seperti adanya para politisi yang memberi kesan seolah-olah ia beragama sebab takut ditolak atau tidak dipilih apabila mengakui bahwa dirinya tidak peduli terhadap agama. Bagi sebagian orang yang mementingkan suatu hal lainnya dalam dunia politik, kebohongan tersebut dianggap sah atau biasa saja namun bagi sebagian orang lainnya khususnya yang memiliki iman yang kuat, kebohongan tersebut tidak dapat diterima. Sehingga disitulah dapat dirasakan adanya tensi mengenai batas antara moralitas pribadi dan moralitas politik.

Machiavelli menawarkan konsep-konsep *virtu* dan *fortuna*, yang masih dimanfaatkan oleh para ilmuwan politik dalam konteks sosialnya (Liddle, 2011). Mengenai *virtu* atau sumber daya politik menurut Machiavelli sangatlah bervariasi, namun Machiavelli lebih

memfokuskan perhatiannya terhadap sifat-sifat sang aktor yang berpikir dan bergerak merupakan sumbangan utamanya kepada pengetahuan mengenai dunia politik. Pemimpin yang memiliki virtu tidak hanya memperbaiki intuisi tetapi juga memberdayakan rakyat untuk berpartisipasi dalam demokrasi (Vano, 2024). Sedangkan Fortuna (keberuntungan pemimpin) adalah sebagian dari tindakan masyarakatnya sedangkan tindakan masyarakat lainnya dikembalikan atau dibebaskan kepada masyarakat agar hak (keinginan bebas) masyarakat dapat terpenuhi. Maka dari itu Machiavelli berpandangan bahwa lebih baik bertindak cepat daripada terlalu berhati-hati, agar pemimpin tidak kehilangan kekuasaan.

Para sejarawan Cambridge School dan kaum republik Neo-Romawi telah menghidupkan pemikiran Machiavelli yang menekankan sisi manusiawi dari tindakan politik (Bíba & Franěk, 2023). Mereka menemukan harta karun yang hilang dari republik Machiavelli dalam konsep kebebasan non-dominasi. Dalam republik neo-Romawi menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip utama demokrasi modern seperti supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum, kebebasan berbicara dan akses bebas ke jabatan dan posisi. Namun pandangan mengenai neo-republikanisme dinilai mengabaikan sifat oligarki dan elitis dari republikanisme klasik dan mengabaikan aspek-aspek yang paling orisinal dan mengganggu dari pemikiran (Bíba & Franěk, 2023). Hal ini berkaitan dengan gambaran Singa Machiavelli.

Mengenai hubungan antara kekuasaan dan konflik dalam pemikiran Machiavelli, tujuan utama penggunaan kekuasaan dan kekerasan yaitu untuk memperjelas bahwa politik tidak dapat dipahami tanpa merujuk pada konflik antara umori para pembesar dan rakyat. Disaat para pembesar ingin menindas dan mendominasi maka rakyat berusaha menghindari hal tersebut. Machiavelli berpihak kepada rakyat dan menciptakan teori-teori republikanisme atau kerakyatan atau plebeianisme.

Pandangan Machiavelli mengenai kemunafikan yaitu bahwa penguasa tidak perlu memiliki kebajikan namun cukup berpura-pura memilikinya. Dalam karya *Ten Theses on Machiavelli*, menyatakan

bahwa mereka harus mengakui sifat ambiguitas moral dari institusi-institusi dan menghindari pembingkai tuntutan mereka dalam keadilan. Dan juga mereka harus secara realistis mengakui bahwa meskipun demokrasi liberal kontemporer dapat diperbaiki dengan membatasi kekuasaan para elit, mereka tidak akan pernah dapat menjadi sempurna karena adanya perbedaan antara yang sedikit dan yang banyak adalah permanen dan tidak dapat dihindari (Bíba & Franěk, 2023).

Perspektif pemikiran Machiavelli tentang kekuasaan di dalam buku *il principe* yang ditafsirkan oleh Prof. Bintan M Saragih dan M. Kusnardi bahwa Machiavelli menekankan pentingnya unsur kekuasaan untuk proses demokrasi dalam negara. Pemerintahan tidak lebih dari sebuah upaya memperoleh kekuasaan dan melaksanakan kekuasaan tersebut. Selain itu, Profesor Kranenburg dan Tk. B. Sabaroedin memiliki pemikiran serupa dengan sebelumnya. Menurut pemahaman mereka berdua, Machiavelli menyatakan bahwa suatu pemerintahan yang baik, pasti akan binasa, itu tidak cocok/asing dengan sistemnya (Attahahara, 2020).

Selain itu dalam karya “*The Wisdom of the People and the Elite: Leo Strauss and John McCormick on Machiavelli*”, mengkonfrontasi interpretasi John McCormick dan Leo Strauss mengenai pemikiran Machiavelli. Yaitu bahwa Strauss mendukung sekaligus mengkritik pembacaan McCormick yang tidak jelas mengenai Machiavelli sebagai demokrasi yang anti elit. Selain itu, Strauss menyatakan bahwa pandangan McCormick mengenai kecenderungan demokratis dan anti elitis Machiavelli dibesar-besarkan karena menurut Strauss, Machiavelli memberikan nasihat politik bukan hanya untuk rakyat namun untuk para penguasa juga dan karena karyanya berisi ajaran esoterik yang ditujukan kepada filsuf yang berpotensi yaitu anggota intelektual yang berlawanan dengan elit politik (Siregar & Ba’dawi, t.t.).

IV. KESIMPULAN

Dalam karya "Il Principe", Niccolò Machiavelli memberikan pandangan yang realistis dan empiris mengenai kekuasaan dan kepemimpinan. Ia mengklasifikasikan bentuk pemerintahan menjadi kerajaan yang dikuasai oleh raja dan bangsawan, dan membedakan antara negara turunan dan negara campuran. Machiavelli menegaskan bahwa kekuasaan bersifat absolut dan sering kali memerlukan penggunaan kekejaman atau intimidasi untuk memastikan kepatuhan masyarakat. Ia berargumen bahwa seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan politik, kekuatan militer, dan keberanian untuk mengambil keputusan tegas, bahkan jika itu berarti menggunakan taktik yang tidak sama sekali bermoral. Machiavelli juga menekankan pentingnya hubungan antara penguasa dan rakyat, yang harus berlandaskan pada keseimbangan kepentingan. Dalam pandangannya, keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh *virtue* dan *fortune*, di mana kemampuan untuk merawat kestabilan politik dan keberuntungan memiliki fungsi yang penting dalam mencapai tujuan kepemimpinan. Dengan demikian, Machiavelli memberikan gambaran tentang kekuasaan yang mencakup aspek moral dan strategis dalam kepemimpinan.

Perspektif Machiavelli mengenai demokrasi berfokus kepada peranan individu sebagai aktor mandiri yang memiliki, menciptakan dan memanfaatkan sumber daya politik. Machiavelli memisahkan yang aktual dari yang ideal, menyatakan tensi antara moralitas pribadi dan moralitas politik yang tidak bisa dihindari, dan menawarkan konsep-konsep *virtu* dan *fortuna*. Pemikiran Machiavelli mengenai demokrasi lebih banyak ditemukan dalam karya-karya para sejarawan Cambridge School dan kaum republik Neo-Romawi yang telah menghidupkan pemikiran Machiavelli.

Saran

Para tokoh penguasa dan politikus perlu memahami konsep-konsep pemikiran Machiavelli mengenai kekuasaan, kepemimpinan dan demokrasi karena pada saat ini masih banyak fenomena yang sesuai dengan pandangan Machiavelli yang bersifat realistis. Dengan adanya pemahaman tersebut dapat membantu dalam mempertahankan kekuasaannya, kedaulatan dan melindungi negara dengan memperhatikan bagaimana demokrasi agar tetap berjalan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

Attahahara, H. (2020). PERSPEKTIF IDEOLOGI DAN KEKUASAAN DALAM PEMIKIRAN MACHIAVELLI: STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 2019. *Jurnal JISIPOL*, 4(1), 85–100.

Bíba, J., & Franěk, J. (2023). Machiavelli and Contemporary Politics. *Theoria*, 70(174), 1–7. <https://doi.org/10.3167/th.2023.7017401>

Fahrezy, A. F., & Hamid, R. A. (2021). PEMIKIRAN POLITIK NICCOLO MACHIAVELLI: STUDI KASUS DINASTI UMAYYAH. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 4(2). <https://doi.org/10.14421/lijid.v4i2.2866>

Hardiman, F. B. (2019). PEMIKIRAN MODERN DARI MACHIAVELLI SAMPAI NIETZSCHE. PT KANISIUS.

Honeycutt, K. (t.t.). Niccolò Machiavelli (1469—1527). *Internet Encyclopedia of Philosophy*. <https://iep.utm.edu/machiave/>

Irpan, D., Riyanto, FX. E. A., Marianta, Y. I. W., & Ranubaya, F. A. (2024). Panglima: Sosok Pemimpin Ideal dalam Pandangan Masyarakat Dayak (Diskursus Filosofis Berdasarkan Pemikiran Machiavelli terhadap Kepemimpinan Panglima Jilah, Pemimpin Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng). *Borneo Review*, 3 (1), 28–35.

Liddle, W. (2011). MARX ATAU MACHIAVELLI? Menuju Demokrasi Bermutu di Indonesia dan Amerika. YAYASAN PARAMADINA.

Machiavelli, N. (1987). Sang penguasa: Surat seorang negarawan kepada pemimpin republik. Gramedia.

Maskanah, U., Burhanuddin, S. F., Zaenudin, K. I. S., & Suhartini, S. P. (2024). SHARIA BANKING DISPUTE RESOLUTION MODEL THAT IS EFFECTIVE, EFFICIENT AND FAIR. *Awang Long Law Review*, 7(1), 147–155. <https://doi.org/10.56301/awl.v7i1.1390>

Model Negara Kekuasaan: Orde Baru dalam Tinjauan Pemikiran Hobbes dan Niccolo Machiavelli | Oktaviani | Perspektif Indonesia. (t.t.).

Diambil 20 Maret 2025, dari
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/26701>

Puspitasari, S. H. (2001). Kontektualisasi Pemikiran Machiavelli tentang Kekuasaan-Tujuan Negara. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 8(18), 30–45. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art3>

Putra, G. F. (2014). EVERYTHING IS PERMITTED: SEBUAH ULASAN SINGKAT IL PRINCIPE KARYA MACHIAVELLI. *Narasi*, 75–78.

Qomariyah, N. (2024). Perspektif Ideologi dan Kekuasaan (Telaah Historis Pemikiran Niccolo Machiavelli). *Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS*, 6(3), 352. <https://doi.org/10.30998/herodotus.v6i3.15729>

Siregar, S. N. A., & Ba'dawi, M. A. (t.t.). PEMIKIRAN MODERNISASI POLITIK BARAT DALAM MENJELAJAH URGENSI POLITIK ISLAM DI ERA GLOBAL. *ACADEMIA*. https://www.academia.edu/83244975/PEMIKIRAN_MODERNISASI_POLITIK_BARAT_DALAM_MENJELAJAH_URGENSI_POLITIK_ISLAM_DI_ERA_GLOBAL

Tia Setiadi (Ed.) (with Skinner, Q. & Auliaul Fitrah Samsuddin). (2022). *Niccolo Machiavelli: Sebuah pengantar singkat* (Cetakan pertama, Februari 2022). Basabasi.

Vano, M. P. (2024). Konsep Kekuasaan Menurut Niccolò Machiavelli (Tinjauan Etika Politik atas Pesta Demokrasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia 2024). *JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI*, 23(2), 407–418. <https://doi.org/DOI.10.21009/jimd.v23i2.45182>

Viroli, M. (t.t.). *Niccolò's Smile A Biography of Machiavelli*. The New York Times. <https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/first/v/viroli-smile.html>